



**PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG
NOMOR KD/22-Bapemperda/XI/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rapat Paripurna, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disetujui penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 20).

- Memperhatikan : 1. Laporan Bapemperda tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2025.
2. Nota Kesepakatan antara DPRD Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung.
3. Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung tanggal 26 November 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun 2025.

KEDUA : Daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 November 2024

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG



The official stamp of the DPRD Kota Bandung is circular, featuring a central emblem with a shield and a banner below it that reads 'DPRD'. The emblem is surrounded by a wreath. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink.

H. EDWIN SENJAYA


LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kota Bandung Nomor
:KD/22-Bapemperda/XI/2024 tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kota Bandung Tahun 2025.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG YANG AKAN
DIBAHAS DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN
1.	Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Propemperda 2024
2.	Penyelenggaraan Reklame	Propemperda 2024
3.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035	Propemperda 2024
4.	Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Propemperda 2024
5.	Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Propemperda 2024
6.	Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Propemperda 2024
7.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2024	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
8.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2025	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2026	Pemerintah Kota Bandung (Badan Keuangan dan Aset Daerah)
10.	Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
11.	Penyelenggaraan Pondok Pesantren	Pemerintah Kota Bandung (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
12.	Keberagamaan Kehidupan Bermasyarakat di Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)
13.	Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025-2045	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
14.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Sosial)

NO	JUDUL RAPERDA	USULAN
15.	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Pemerintah Kota Bandung (Satuan Polisi Pamong Praja)
16.	Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Kesehatan)
17.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung	Pemerintah Kota Bandung (Bagian Perekonomian)
18.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	Pemerintah Kota Bandung (Dinas Lingkungan Hidup)
19.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Pemerintah Kota Bandung (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG,



H. EDWIN SENJAYA